



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

EKONOMI

Selasa, 7 November 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. PEMERINTAH ANDALKAN STIMULUS FISKAL – *Media Online Kompas*
2. UPAH MINIMUM 2024 TAK CUKUP SIGNIFIKAN – *Media Online Kompas*
3. DATA PENGGANGURAN PERLU DIWASPADAI – *Media Online Republika*
4. DOSIS MINI STIMULUS EKONOMI – *Media Online Bisnis Indonesia*
5. PENCAPAIAN SDGs INDONESIA PALING PROGRESIF – *Media Online Media Indonesia*
6. JUMLAH PENGANGGURAN MELAMPAUI PRA-PANDEMI – *Media Online Kontan*
7. EKONOMI INDONESIA MASIH BERPUTAR DI JAWA – *Media Online Kontan*

## Pemerintah Andalkan Stimulus Fiskal

Paket kebijakan stimulus fiskal diharapkan bisa menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi agar tetap di atas 5 persen pada tahun 2023 dan 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa menggerak ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 persen di sisa tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 persen secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya.

Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga di triwulan III-2023 tumbuh 5,06 persen, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 persen.

Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih mekuat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7. Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 persen untuk triwulan III-2023.

"Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisi ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Melihat kondisi terkini yang semakin diliputi ketidakpastian, pemerintah memperkirakan ekonomi bisa melambat lebih lama. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2023 diproyeksikan bisa melemah ke 4,81 persen dari proyeksi awal 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 juga diperkirakan bisa turun dari 5,04 persen ke 4,99 persen.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti.

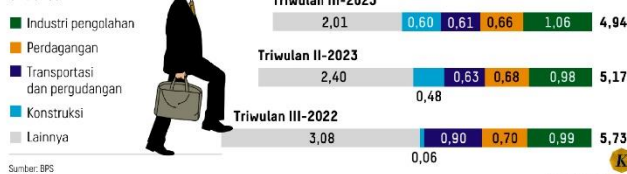
Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan III-2023 (% yoy)



Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2023

Menurut Lapangan Usaha (% yoy)



Sumber: BPS

INFOGRAFIK: LULUUR

sebanyak 0,2 persen sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 persen dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 persen.

"Tahun depan juga begitu, kita harapkan dengan adanya kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,16 persen sehingga ekonomi kita tahun depan bisa terjaga di atas 5 persen, yaitu 5,24 persen," ujar Sri Mulyani.

### Tidak menambah insentif

Paket kebijakan stimulus fiskal itu, antara lain, terdiri dari penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino dan menjaga daya beli masyarakat lewat perpanjangan pemberian bansos beras 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ada pula bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan yang disalurkan ke 18,8 juta KPM.

Selain itu, ada pula penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR), serta penguatan sektor properti lewat Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) khusus pembelian rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. PPN DTP ini akan diberikan 100 persen untuk periode November 2023-Juni 2024, dan 50 persen untuk periode Juli-Desember 2024.

Di sektor properti, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi biaya pengurusan administrasi rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ada juga tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial untuk program perbaikan rumah masyarakat miskin.

Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, untuk sementara ini, pemerintah belum akan menambah insentif lain di luar stimulus fiskal yang sudah disiapkan. "Terkait paket yang kita rumuskan untuk akhir tahun ini, biar yang terkait dengan PPN dulu saja. Kalau untuk yang lain, nanti kita lihat lagi *fine tuning*-nya seperti apa," katanya.

Berhubung kondisi ekonomi global sedang melambat, pemerintah akan lebih mengandalkan mesin domestik untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. "Ekspor memang akan menurun karena harga komoditas pun relatif lebih rendah dari tahun lalu, dan *demand*-nya juga sedikit melemah. Tetapi, kami optimistis ekspor-impor tetap bisa terus kita dorong," ujarnya.

Di tengah permintaan global yang lesu itu, dukungan untuk sektor manufaktur berorientasi ekspor tetap diberikan. Salah satunya memperbolehkan sektor manufaktur yang biasanya melakukan ekspor untuk bisa menjual produknya lebih banyak di dalam negeri. "Biasanya ekspor, kali ini bisa juga menjual ke dalam negeri, kita relaksasi dari 50 persen jadi lebih dari 50 persen," ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, untuk sementara ini, pemerintah akan fokus pada paket stimulus fiskal yang sudah ada terlebih dahulu. Ia mencontohkan, sistem untuk implementasi kebijakan BLT dan bansos beras sudah tertata dengan baik sehingga kebijakan itu bisa langsung dieksekusi tanpa persiapan ekstra.

"Jadi, kita menggunakan ruang fiskal yang ada dan waktu yang tersisa di tahun 2023 ini untuk menggunakan APBN de-

ngan mekanisme yang sudah terbentuk agar tidak usah menimbulkan masalah baru dalam menggerakkan birokrasi," kata Sri Mulyani.

Secara terpisah, Ekonom Bank Permata Josua Pardele mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2023 cenderung lebih rendah dari perkiraan terutama didorong oleh kontraksi laju belanja pemerintah. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi masih memiliki kontribusi terbesar daripada komponen lainnya.

"Pengeluaran diperkirakan akan mendapatkan momentum pada triwulan IV-2023, didorong oleh persiapan Pemilu 2024 dan peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan bantuan sosial," katanya.

### Buah hilirisasi

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan industri pengolahan triwulan III-2023 mencapai 5,20 persen secara tahunan. Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pendapatan domestik bruto (PDB) dengan besaran 18,75 persen.

Dihubungi pada Senin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kinerja industri pengolahan pada triwulan III-2023 yang lebih tinggi secara tahunan ini merupakan buah dari hilirisasi hasil bumi dan mineral yang kian lancar.

Selain itu, lanjut Shinta, kebijakan pemerintah memperluas larangan ekspor barang mentah selain nikel turut mendorong komoditas itu untuk dijual terlebih dahulu sehingga bernilai tambah, ketimbang dijual mentah dengan harga yang lebih murah. (AGE/AGP/BKY)

## Upah Minimum 2024 Tak Cukup Signifikan

Kelompok pekerja memperkirakan standar upah minimum 2024 tidak cukup signifikan di tengah tingginya biaya hidup akibat dampak inflasi. Pekerjaan dengan upah layak sangat dibutuhkan oleh angkatan kerja.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan segera mengeluarkan regulasi terkait upah minimum. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kelompok pekerja adalah kenaikan upah minimum tahun 2024 tidak signifikan, sementara biaya kebutuhan hidup terus merambat naik.

"Hasil pertumbuhan ekonomi (triwulan III-2023 oleh Badan Pusat Statistik/BPS) adalah salah satu variabel yang kami pakai dalam formula penyesuaian upah minimum. Kita tunggu saja. Dalam minggu ini ada kabar," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri saat ditanya kapan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disahkan, Senin (6/11/2023), di Jakarta.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sebelumnya, UU Cipta Kerja tidak mengatur tentang variabel "indeks tertentu" dalam penetapan upah minimum. Upah minimum sebelumnya ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi serta mempertimbangkan variabel batas atas dan batas bawah upah minimum. Karena itu, PP No 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja terdahulu harus direvisi.

Dalam paparan Kemenaker mengenai Rancangan PP (RPP) tentang Perubahan Atas PP No 36/2021 disebutkan, bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum

tahun sebelumnya, maka penetapan upah minimum setiap tahunnya dilakukan lewat penjumlahan upah minimum tahun berjalan dengan nilai penyesuaian upah minimum.

Nilai penyesuaian upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Simbol alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Simbol alfa ini ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain pertimbangan dua faktor tersebut, dalam menentukan alfa dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil dari nol, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, dalam RPP itu disebutkan nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan besaran upah minimum pada tahun berjalan.

"Rata-rata besaran kenaikan upah minimum secara nasional belum bisa saya rilis karena masih menunggu data final dari BPS karena bukan cuma data/angka pertumbuhan ekonomi yang kami perlukan, tetapi juga data lain. Misalnya, data inflasi," ujar Indah.

Pada Senin, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia

triwulan III-2023 tumbuh 4,94 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan II-2023 yang sebesar 5,17 persen.

BPS juga merilis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023. Dalam Sakernas Agustus 2023, jumlah angkatan kerja sebanyak 147,71 juta orang atau naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik tipis 0,85 persen dibanding Agustus 2022. Sementara tingkat pengangguran terbuka Agustus 2023 adalah 5,32 persen, turun 0,54 persen dibanding Agustus 2022.

### Upah riil turun

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, saat dihubungi terpisah, menduga, dengan formula baru penghitungan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak akan signifikan. Kenaikan tersebut bakal terimbas oleh inflasi riil di sektor pangan yang sudah mencapai lebih dari 5 persen.

"Kami khawatir akan terjadi penurunan upah riil. Kesejahteraan pekerja menurun. Pemerintah semestinya mengukur jeli inflasi berdasarkan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja," katanya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menambahkan, jika formula penghitungan seperti itu jadi dilaksanakan oleh pemerintah, itu akan mengecewakan kelompok pekerja. Biaya kebutuhan hidup saat ini sudah dirasa sangat tinggi.

"Di mana-mana masyarakat sudah menjerit. Upah yang diterima sudah tidak sebanding dengan besarnya biaya hidup. Mencari pekerjaan juga semakin sulit," ucap Mirah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on

Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, adanya faktor alfa dalam rumus perhitungan upah minimum artinya pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diakomodasi sebagai penambah upah. Dia menduga, ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penambahan keuntungan di beberapa perusahaan.

"Dalam paparan RPP tentang Perubahan Atas PP No 36/2021, formula penghitungan upah minimum masih memasukkan faktor inflasi. Sepanjang formula penghitungan diikuti, upah minimum setiap tahun masih naik. Akan tetapi, kenaikan upah riil tidak akan signifikan karena unsur penambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa," ucap Faisal.

Menurut dia, masih ada faktor-faktor lain yang jadi penentu kesejahteraan pekerja. Sebagai contoh, kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial dan asuransi yang difasilitasi oleh perusahaan. Hanya saja, upah minimum selalu menjadi faktor krusial dalam kehidupan pekerja. Selama ini kerap terjadi kasus sejumlah perusahaan tidak menerapkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, M Hadi Subhan, berpendapat, jika formula penghitungan upah minimum yang ada dalam paparan Kemenaker itu jadi diterapkan, nasib upah minimum akan memprihatinkan. Formula seperti itu hanya mengakomodasi faktor inflasi, sementara angka pertumbuhan ekonomi porsinya tidak signifikan.

"Pengangguran berpotensi naik. Solusi pemberian bantuan sosial kurang tepat sebab yang dibutuhkan angkatan kerja adalah mendapat kerja layak," ujarnya. (MED)

# REPUBLIKA

SELASA, 7 NOVEMBER 2023

» EKONOMI

## Data Pengangguran Perlu Diwaspadai

*BUMN diharapkan dapat terus berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran.*

■ Oleh **Rahayu Subekti**

JAKARTA -- Tingkat pengangguran per Agustus 2023 tercatat mengalami penurunan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Meski terjadi penurunan, angka pengangguran di Tanah Air dinilai tetap perlu diwaspadai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dari total 147,71 juta angkatan kerja.

Jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen daripada Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang. Meski terus

Hal itu agar investasi yang tercipta dapat lebih berkualitas dengan menyerap tenaga kerja lokal.

"Tentunya adalah mendorong terus industrialisasi sehingga dari sektor industri manufaktur bisa lebih banyak menyediakan lapangan kerja baru," ujar Bhima.

Bhima menambahkan, usaha memacu pertumbuhan sektor industri manufaktur diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Upaya tersebut juga sejalan dengan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan fokus pada langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat membuka peluang baru dalam hal lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti dalam paparannya pada Senin (6/11/2023) mengatakan, pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan 5,32 persen dari total angkatan kerja pada periode tersebut.

Amalia menuturkan, angka tersebut lebih rendah 0,54 persen atau turun

menurun, jumlah dan tingkat pengangguran itu masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2019 atau sebelum pandemi, yakni 7,1 juta orang.

"Secara jumlah memang ini perlu terus diwaspadai karena sebagian besar perusahaan yang bangkit dari pandemi lebih memprioritaskan merekrut mereka yang dirumahkan saat pandemi dibandingkan melakukan rekrutmen baru. Itu tantangannya," ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Senin (6/11/2023).

Menurut Bhima, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat terus sebanyak 0,56 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2022. "Tapi, tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19," kata Amalia.

Amalia menjelaskan, terdapat 212,59 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2023. Dari total tersebut, sebanyak 147,71 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. "Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,48 persen" ucap Amalia.

Dia mengungkapkan, proporsi pekerja formal mengalami peningkatan yang didorong oleh bertambahnya proporsi penduduk. Khususnya penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai.

"Sementara itu, proporsi pekerja penuh juga meningkat meskipun masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi," ucap Amalia.

BPS mencatat, tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara itu, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah akomodasi dan makanan-minuman, konstruksi, serta pertanian.

berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia, dengan lebih aktif dalam menciptakan peluang pekerjaan sambil menunggu pemulihan penuh dari sektor swasta. Kemudian, lanjut Bhima, salah satu yang menjadi langkah krusial adalah meningkatkan penawaran tenaga kerja dengan memastikan kesesuaian antara keahlian dan kebutuhan pasar.

"Ya, tentu dari segi penawaran tenaga kerja harus didorong terus, ya. Kesesuaian antara keahlian, lulusan sekolah vokasi, SMK, itu dengan pasar tenaga kerja," kata Bhima.

Selanjutnya, penekanan pada investasi padat karya juga ikut menjadi kunci.

Mengenai peningkatan pekerja formal, Amalia menjelaskan, hal itu terjadi karena meningkatnya pekerja dengan status buruh, karyawan, dan pegawai.

Berdasarkan data BPS, pekerja formal pada Agustus 2019 mencapai 44,12 persen, pada Agustus 2020 mencapai 39,53 persen, dan pada Agustus 2021 mencapai 40,55 persen. Sementara itu, pada Agustus 2022, porsi pekerja formal mencapai 40,69 persen dan pada Agustus 2023 mencapai 40,89 persen.

"Sebanyak 57,18 juta orang bekerja pada kegiatan formal yang naik 0,20 persen poin dibandingkan Agustus 2022," ucap Amalia.

BPS juga mencatat, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Kelompok lapangan usaha tersebut meningkat sebesar 1,18 juta orang.

Sementara itu, BPS juga mencatat jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang. Amalia menuturkan, angka tersebut turun sebesar 0,69 juta orang dari Agustus 2022.

Kolom: Ekonomi

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

SELASA, 7 NOVEMBER 2023

## DOSIS MINI STIMULUS EKONOMI

### Pertumbuhan Ekonomi Sejak Pandemi



### Pertumbuhan Komponen Utama Pembentuk PDB (% YoY)

Periode	Konsumsi Rumah Tangga	PMTB	Ekspor
Kuartal I/2022	4,34	4,08	14,22
Kuartal II/2022	5,51	3,09	16,40
Kuartal III/2022	5,39	4,98	19,41
Kuartal IV/2022	4,48	3,33	14,93
Kuartal I/2023	4,54	2,11	11,94
Kuartal II/2023	5,22	4,63	-2,97
Kuartal III/2023	5,06	5,77	-4,26

Tegar Ariel  
tegar.ariel@bisnis.com

**E**konomi nasional butuh injeksi energi dosis tinggi untuk menjaga laju produk domestik bruto (PDB) tahun ini sesuai angka sasaran.

Maklum, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan tak makin mudah. Perang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah melahirkan kecemasan soal kembali melesatnya inflasi terutama pangan dan energi.

Belum lagi kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama alias *higher for longer* di bank sentral negara maju, yang menciptakan tekanan pada rupiah dan menghambat ekspansi bisnis.

Tak pelak, stimulus lanjutan pun wajib disediakan dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini.

Apalagi, realisasi laju PDB pada kuartal III/2023 terbilang amat lambat, yakni 4,94%, di bawah target pemerintah sebesar 5% dan merupakan capaian terendah dalam delapan kuartal terakhir.

Pemerintah sejatinya menyadari betul adanya risiko dan penghalang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Insentif pun kembali dikururkan.

Hanya saja, sejumlah kalangan menilai stimulus yang digulirkan pemerintah kurang komprehensif karena lagi-lagi hanya menyentuh sisi permintaan atau konsumsi, dan terkesan mengabaikan aspek penawaran alias produksi.

Padahal, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komponen penopang PDB jelas membutuhkan pendampingan, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Utamanya ekspor, yang pada kuartal III/2023 hancur lebur, yakni -4,26% (*year-on-year*/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2023 yakni -2,97% (YoY).

Nyatanya, dalam kebijakan terbaru pemerintah hanya menambah paket insentif berupa tambahan bantuan pangan yang semula hanya sampai tahun ini diperpanjang hingga medio 2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah  
BISNIS/WIN CAHYONO



Harus diakui, paket tersebut menguatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, trik itu tak bisa sepenuhnya efektif sepanjang pemangku kebijakan tidak memberikan stimulus dari sisi produksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk memberikan insentif lain dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"APBN [2023] kan tutup Desember, jadi kita memaksimalkan yang mungkin dieksekusi dua bulan terakhir," katanya, Senin (6/11).

Sri Mulyani tak memungkiri bahwa dinamika perekonomian global memberikan hantaman yang keras. Apalagi, pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed).

Pemerintah pun terus memantau perkembangan tersebut dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka menjaga stabilitas inflasi, pasar keuangan, serta ketahanan eksternal.

Dalam kaitan perdagangan internasional, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan menyusul kinerja ekspor yang *boncos*.

Hal itu disebabkan oleh perlambatan ekonomi dunia termasuk China yang membatasi ekspor produk nonmigas, sementara ekspor migas terpeluk oleh pelemahan harga komoditas.

Di sisi lain, penjualan produk di dalam negeri terkendala oleh batasan regulasi serta terbatasnya daya beli masyarakat.

Perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, me-

natakan akan merevisi ketentuan soal produk manufaktur.

### REVISI ATURAN

Sebelumnya, 50% produk manufaktur wajib dipasarkan di dalam negeri. Adapun dalam revisi aturan tersebut, produk yang dipasarkan di dalam negeri bisa lebih dari 50% sehingga *output* manufaktur terserap. Inilah kemudian yang mendasari pemerintah memfokuskan insentif pada sisi permintaan.

"Tentu [kami] melihat *demand* relatif melemah, [sehingga] beberapa kebijakan dilakukan pemerintah termasuk [untuk pasar] dalam negeri," katanya.

Insentif yang terkonsentrasi pada konsumsi memang cukup rasional, mengingat porsinya terhadap PDB amat dominan.

Meski demikian, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pebisnis agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mendaki.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu becermim pada realisasi ekonomi kuartal III/2023 taklaka pertumbuhan konsumsi amat terbatas, sementara investasi dan ekspor dilindungi ketidakpastian.

Dia menyebut, terdapat faktor internal dan eksternal yang mendasari kondisi tersebut. Faktor internal meliputi gejala politik di masa transisi. Adapun faktor eksternal yakni gejala geopolitik, inflasi di pasar global dan pelemahan rupiah. Oleh sebab itu, Shinta meminta agar pemerintah dan BI menyiapkan instrumen penstabil mata uang Garuda.

### Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

UNCTAD  
(September 2023)

2023	2024
4,2	4,1

IMF  
(Oktober 2023)

2023	2024
5,0	5,0

WORLD BANK  
(Oktober 2023)

2023	2024
5,0	4,9

ADB  
(September 2023)

2023	2024
5,0	5,0

OECD  
(September 2023)

2023	2024
4,7	5,1

### PEMERINTAH

2023	2024
5,3	5,2



"Kalau fundamental stabilitas ini tidak bisa diciptakan, risiko perlambatan ekonomi akan makin tinggi," katanya.

Sementara itu, kalangan ekonom berharap pemerintah tak hanya menyiapkan insentif juga memacu belanja negara lebih akseleratif sehingga memberikan daya gedor ke PDB.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 antara lain konsumsi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, secara historis belanja negara acap kali melesit pada pengujung tahun. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi.

Meski porsi terhadap PDB amat kecil, setidaknya ini mampu mengompensasi pengurangan pertumbuhan pada penopang PDB lainnya. "Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap solid di kisaran 5,07%, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kumulatif tiga kuartal 2023 tercatat 5,05%," ujarnya.

Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah perlu dipertajam, utamanya menasar langsung pelaku ekspor. "Insentif untuk mendukung ekspor barang jadi misalnya, akan sangat efektif," katanya. (Annasa R. Kamalina/Maria Elena/NI Luh Anggela/Dwi Racmawati) E

Hlm: 1 - Kolom: Halaman Depan

## Pencapaian SDGs Indonesia Paling Progresif

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan pandemi covid-19 memengaruhi pencapaian target target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bahkan pascapandemi, tantangan untuk pencapaian target SDGs tetap ada dan tidak kalah beratnya.

"Masih banyak tantangan di sejumlah wilayah kita, baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola dalam situasi yang bergerak dinamis ini. Kita sama-sama pahami bahwa hari ini kita di seluruh dunia menghadapi *triple planetary crisis*, yakni ancaman perubahan iklim, peningkatan polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau SDGs Annual Conference (SAC) 2023, di Yogyakarta, kemarin.

Ancaman perubahan iklim dinilai memberikan dampak terhadap kelangkaan air serta penurunan produktivitas pertanian.

### Guna memacu pencapaian SDGs, Indonesia menyusun *roadmap* SDGs 2023 hingga 2030.

Di Indonesia, diprediksi terjadi penurunan curah hujan tahunan sekitar 1%-4% selama periode 2020-2034. Hal itu dinilai akan berimplikasi terhadap potensi adanya kekeringan, ketersediaan air yang berkurang, dan memicu konflik kebutuhan air.

Lebih lanjut, produksi padi juga berpotensi mengalami penurunan karena pergeseran musim dan puncak hujan yang menyebabkan metode tanam berubah sehingga memengaruhi tingkat produksi.

Terlepas dari kondisi yang menantang itu, capaian SDGs Indonesia pada 2022 paling progresif dalam kategori negara dengan pendapatan menengah atas.

"Capaian indikator SDGs Indonesia mencapai 62% dari total target (224 indikator) yang dapat dievaluasi sehingga Indonesia dianggap paling progresif dalam pencapaian SDGs pada kategori negara dengan pendapatan menengah atas," tandasnya.

Guna memacu pencapaian target SDGs yang tersisa tujuh tahun lagi, pemerintah menyusun *road map* SDGs Indonesia 2023 hingga 2030. (Ant/E-1)

## Jumlah Pengangguran Melampaui Pra-Pandemi

Pertumbuhan ekonomi semakin minim memacu lapangan kerja

Dendi Siswanto

JAKARTA. Tingkat pengangguran di Indonesia kembali menurun. Namun angka tersebut belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Kualitas ekonomi yang belum optimal diyakini menjadi salah satu penyebabnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2023 mencapai 7,86 juta jiwa. Alhasil, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di periode tersebut mencapai 5,32%.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan jumlah pengangguran per Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang. Adapun TPT pada periode Agustus 2022 mencapai sebesar 5,86%.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widayanti mengungkapkan, jumlah pengangguran mengalami penurunan di daerah perkotaan, sementara di wilayah pedesaan mengalami kenaikan.

Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat 6,40%, menurun dari 7,74% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan TPT di pedesaan tercatat 3,88% atau meningkat dari 3,43% pada Agustus 2022.

"Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," terang Amalia, Senin (6/11). Sebelum Covid-19 melanda, tepatnya pada Agustus 2019, jumlah pengangguran tercatat 7,10 juta jiwa dengan TPT 5,23%.

Adapun jumlah angkatan

**Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi.**

kerja pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta jiwa, naik sebanyak 3,99 juta orang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, angkatan kerja yang terserap hanya 139,85 juta jiwa. Dengan kata lain, sisanya merupakan pengangguran.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta jiwa sepanjang periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023.

Belum maksimal

Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengemukakan, Indonesia masih perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan perekonomian. Hal ini bertujuan agar angka *Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) terus membaik. Adapun ILOR merupakan parameter yang menghitung serapan tenaga kerja per satu persen pertumbuhan.

Menurut dia, penurunan jumlah pengangguran sebanyak 0,65 juta jiwa belum maksimal dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% *year on year* (yoy).

"Penurunan 0,56 juta pengangguran dalam setahun terbilang belum maksimal, jika dikomparasikan dengan rata-rata pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 5% per tahun," ungkap Ronny kepada KONTAN, kemarin.

Dia menambahkan, meski terdapat angkatan kerja baru lebih dari 3 juta orang dan terjadi peningkatan tipis pada tingkat partisipasi kerja, faktanya orang yang mendapatkan pekerjaan tetap sangat kecil, yakni hanya sekitar 37%

dari total angkatan kerja yang bekerja.

"Sisanya pekerja di sektor informal, baik berusaha sendiri atau menjadi paruh waktu di sektor informal, dan sejenisnya," kata Ronny.

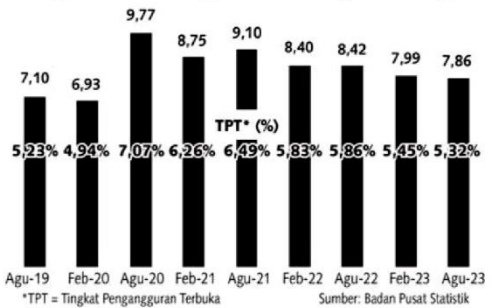
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal masih mendominasi tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2023. Tercatat, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yakni sebanyak 59,11% hingga Agustus 2023. Sementara sisanya sebanyak 40,89% pekerja di sektor

formal.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama dengan memberikan prioritas pada investasi di sektor riil, seperti sektor manufaktur dan jasa, baik segmen penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Selain itu, Ronny bilang, pemerintah juga harus memitigasi imbas disrupti teknologi, lantaran digitalisasi dan mekanisasi produksi mengurangi peluang kerja. ■

**Jumlah dan Tingkat Pengangguran Agustus 2019-Agustus 2023 (juta orang)**



## Ekonomi Indonesia Masih Berputar di Jawa

JAKARTA. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengerek pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan. Namun tetap saja, ekonomi nasional masih terpusat di Pulau Jawa, alias Jawa Sentris.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan tercatat 4,83% *year on year* (yoy) pada kuartal III-2023. Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Pulau Kalimantan, dengan sumbangsih sebesar 2,76% yoy.

Selain itu, Kalimantan Timur juga mencetak pertumbuhan tertinggi di sektor konstruksi, yaitu 16,26% yoy. "Tentu hal ini didorong proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tercermin dari peningkatan realisasi pengadaan semen," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanri, Senin (6/11).

Sayangnya, Pulau Kalimantan hanya menyumbang 8,08% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa.

Sebab, pada kuartal III-2023,

Pulau Jawa berkontribusi 57,12% terhadap ekonomi nasional. Pada periode ini, ekonomi Pulau Jawa tercatat tumbuh 4,83% yoy.

Amalia bilang, sumber pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, yakni dari Provinsi DKI Jakarta dengan sumbangan sebesar 1,37%, didorong sektor informasi dan komunikasi, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum.

Adapun Pulau Sumatra menjadi kontributor terbesar kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2023. Dengan kontribusi 22,16%, pertumbuhan Pulau Sumatra tercatat 4,50% yoy.

Sumber pertumbuhan ekonomi di Sumatra adalah wilayah Sumatra Utara, yaitu dengan sumbangan 1,14%. Sumber pertumbuhan utama adalah sektor perdagangan, konstruksi, serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

"Ekonomi Indonesia berdasarkan wilayah masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra," kata Amalia.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2023 mencapai 4,94% yoy, melambat dari kuartal sebelumnya yang tum-



KONTAN/Fronsisikus Simbolon

Sumber pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, yakni dari Provinsi DKI Jakarta dengan sumbangan sebesar 1,37%.

buh 5,17% yoy. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kumulatif Januari-September 2023 mencapai 5,05% yoy.

Perlambatan ekonomi tersebut karena kontraksi belanja pemerintah sebesar 3,76% yoy lantaran penurunan belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial. Pergeseran pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) ke kuartal II, juga men-

jadi penyebabnya.

Kinerja ekspor pada kuartal III-2023 juga mengalami kontraksi 4,26% yoy. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) dengan pertumbuhan 5,06% yoy dan penanaman modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,77% yoy.

Dendi Siswanto